



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS PERHUBUNGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUPRIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **455181**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.499.550.000**

1. Tanah Seluas 979 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1095 m2/84 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 1874 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 93.700.000
4. Tanah Seluas 717 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 35.850.000
5. Tanah Seluas 987 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 2053 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
7. Tanah Seluas 955 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
8. Tanah Seluas 1553 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/150 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
10. Tanah Seluas 970 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 23.000.000**



1. MOTOR, HONDA REVO FIT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO X1H02N35M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 339.264.143

F. HARTA LAINNYA

Rp. 40.000.000

Sub Total

Rp. 2.901.814.143

III. HUTANG

Rp. 467.059.598

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.434.754.545

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.